



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pkk Sebagai Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Tingkat Desa

Natasya Amelia Putri¹, Etty Andyastuti², Irawan Hadi Wiranata³

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

This study examines the role of the Family Welfare Empowerment Program (PKK) as a vehicle for civic education implementation at the village level. The study was conducted in Purwoasri Village, Purwoasri Subdistrict, Kediri Regency, using a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, and validated through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The findings show that programs under Pokja I to Pokja IV contain three dimensions of civic education, namely civic knowledge, civic skill, and civic disposition. The community empowerment process runs through the stages of awareness, transformation, and capacity improvement, and produces positive impacts on women's participation, family welfare, and civic awareness among villagers. Support from the village government and collaboration among stakeholders act as the main supporting factors, while limited administrative capacity and cadres' understanding of the civic dimension remain obstacles. These findings confirm that PKK can function as a non-formal civic education institution at the grassroots level.

Keywords: *community empowerment; PKK program; civic education; village*

(*) Corresponding Author:

tasya.ame2004@gmail.com¹, ettyandyastuti@unpkediri.ac.id²,
wiranata@unpkediri.ac.id³

How to Cite: Putri, N., Andyastuti, E., & Wiranata, I. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pkk Sebagai Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.D), 164-175. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14906>.

INTRODUCTION

Pendidikan kewarganegaraan menempati posisi penting dalam membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya secara normatif, sekaligus mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat yang demokratis. Pendidikan ini tidak dapat dibatasi hanya pada ruang kelas formal. Nilai demokrasi, partisipasi, dan kepedulian publik perlu diaktualisasikan pula melalui ranah sosial-kultural masyarakat. Berbagai organisasi kemasyarakatan tingkat desa, termasuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), memiliki potensi strategis untuk menjadi wadah pendidikan kewarganegaraan tersebut.

Partisipasi warga negara, terutama perempuan, dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi. Data rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester II tahun 2025 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum RI mencatat total pemilih sebanyak 211.865.861 orang, dan pemilih perempuan mencapai 106.281.968 orang, sedikit lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Kenyataan di lapangan tetap

memperlihatkan kesenjangan partisipasi, karena sebagian ibu-ibu di tingkat desa masih bingung ketika memberikan suara atau bahkan cenderung menjadi pemilih pasif (Sari et al., 2024). Faktor budaya patriarki, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan minimnya akses terhadap pengetahuan politik turut menjadi kendala perempuan desa untuk terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan desa (Septiani, 2018).

PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang berakar hingga tingkat dasawisma, sehingga memiliki posisi strategis untuk menjembatani kesenjangan partisipasi tersebut melalui 10 Program Pokok PKK yang mencakup dimensi pendidikan dan pemberdayaan keluarga (Devfa & Mardhiah, 2022). Kesepuluh program itu dikelompokkan ke dalam empat kelompok kerja: Pokja I membidangi penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong, Pokja II membidangi pendidikan dan keterampilan, Pokja III membidangi pangan, sandang, dan perumahan, dan Pokja IV membidangi kesehatan serta kelestarian lingkungan hidup. Program-program ini, jika dicermati dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, mengandung nilai civic knowledge, civic skill, dan civic disposition yang dapat membentuk warga negara yang aktif dan partisipatif (Febrianti et al., 2023). Winarno (2013) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dalam bentuk informal dan nonformal di masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan seperti PKK.

Fenomena empiris di berbagai desa memperlihatkan bahwa PKK telah menjalankan program pemberdayaan yang secara tidak langsung mengandung muatan pendidikan kewarganegaraan. Di Desa Laut Dendang, misalnya, kader PKK terbukti memahami makna Pancasila dengan cukup baik, meskipun pemaknaan mereka terhadap konsep politik masih terbatas (Sri Devfa & Nellis Mardhiah, 2022). Program penghayatan dan pengamalan Pancasila pada Pokja I serta program pendidikan dan keterampilan pada Pokja II dengan demikian memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan dan perencanaan yang lebih terstruktur.

Dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan, tiga komponen utama menjadi acuan analisis, yaitu civic knowledge sebagai pemahaman tentang hak, kewajiban, dan proses demokrasi, civic skill sebagai kemampuan berpikir kritis dan berpartisipasi secara konstruktif, serta civic disposition sebagai karakter privat dan publik yang mencakup kepedulian, tanggung jawab, dan toleransi (Benu et al., 2026). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang menentukan kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Program-program PKK yang menyentuh ranah keagamaan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan berpotensi memuat ketiga komponen tersebut sekaligus, sehingga layak dikaji secara khusus melalui kerangka civic education.

Kajian tentang peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat sesungguhnya sudah cukup banyak dilakukan, tetapi kesenjangan penelitian masih tampak jelas pada tiga sisi. Dari sisi teori, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengkaji program PKK dengan kerangka civic education yang komprehensif, mencakup civic knowledge, civic skill, dan civic disposition sekaligus. Dari sisi konteks, kajian tentang PKK masih terbatas pada wilayah tertentu dan belum

banyak menjangkau desa dengan karakteristik sosial-budaya yang beragam. Dari sisi metode, sebagian besar penelitian tentang PKK masih menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi kasus yang terbatas, sehingga belum banyak yang menelusuri secara mendalam proses dan makna internalisasi nilai kewarganegaraan.

Kesenjangan tersebut mendorong penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Desa Purwoasri, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena pemberdayaan masyarakat melalui PKK merupakan realitas sosial yang kompleks dan sarat makna, sehingga penggalian data perlu dilakukan secara mendalam dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat mencermati secara intensif variabel yang melatarbelakangi program PKK pada satu unit analisis, tanpa memerlukan perbandingan lintas kasus yang memakan waktu lebih panjang. Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check kemudian diterapkan untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pijakan bagi penelitian ini. Penelitian tentang program PKK di Desa Petogogan menemukan bahwa PKK berperan dalam pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi keluarga, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk, meskipun kajian tersebut belum menyentuh dimensi civic education (Pemerintah Desa Petogogan, 2026). Penelitian tentang peran PKK dalam mewujudkan Desa Cempaka Putih Barat yang mandiri menunjukkan bahwa PKK menjadi penggerak partisipasi masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, tetapi belum mengaitkan temuannya dengan kerangka pendidikan kewarganegaraan (Pemerintah Desa Cempaka Putih Barat, 2025). Penelitian tentang kader PKK Lumajang yang didorong menjadi agen perubahan di tingkat desa mengungkap bahwa kader yang terampil dan kreatif menjadi ujung tombak pembangunan desa di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, namun kajian tersebut masih bersifat reportase kegiatan dan belum merupakan penelitian akademik yang sistematis (InfoPublik, 2025). Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dimensi pendidikan kewarganegaraan dalam program PKK belum banyak dieksplorasi secara mendalam, sehingga penelitian ini relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk program PKK di tingkat desa yang mengandung nilai pendidikan kewarganegaraan, menganalisis proses pemberdayaan masyarakat melalui program PKK dan keterkaitannya dengan nilai kewarganegaraan, menganalisis dampak program PKK terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program PKK sebagai pendidikan kewarganegaraan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses pemberian wewenang, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Jim Ife menjelaskan bahwa ketidakberdayaan masyarakat muncul dari ketiadaan kekuatan atas pilihan pribadi, kekuatan kelembagaan, dan kekuatan sumber daya ekonomi, di samping

ketimpangan struktural yang dialami kelompok tertentu (Zubaedi, 2013; Dina et al., 2023). Prinsip pembangunan menyeluruh, perlawanan terhadap kesenjangan struktural, penghormatan hak asasi manusia, keberlanjutan, dan pemberdayaan menjadi acuan dalam merancang program yang menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kewarganegaraan sekaligus. Kerangka inilah yang digunakan untuk membaca program-program PKK sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan di tingkat desa.

Melalui capaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep pendidikan kewarganegaraan berbasis komunitas, sekaligus memberi rekomendasi praktis bagi penguatan peran PKK sebagai agen pemberdayaan di tingkat desa. Bagian berikut menguraikan metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan yang diperoleh dari kajian ini.

METHODS

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena pemberdayaan masyarakat melalui Program PKK di Desa Purwoasri. Pendekatan kualitatif dipilih karena realitas sosial yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat makna, sehingga peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data dilakukan secara triangulatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam bagaimana program PKK dimaknai dan dialami oleh pelaku serta penerima program dalam konteks sosial-budaya desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu kajian yang dilakukan secara intensif, mendalam, dan komprehensif terhadap satu kelompok masyarakat tertentu. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mencermati seluruh variabel yang melatarbelakangi fenomena pemberdayaan pada satu unit analisis, yaitu Desa Purwoasri, tanpa memerlukan perbandingan lintas kasus yang memakan waktu lebih lama. Pendekatan ini juga sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menghasilkan pemahaman mendalam atas suatu kasus spesifik, bukan generalisasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Purwoasri, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keaktifan kelembagaan PKK yang terstruktur hingga tingkat dasawisma, keberagaman program pemberdayaan yang dilaksanakan, serta ketersediaan informan kunci yang bersedia berpartisipasi. Karakteristik sosial-budaya Desa Purwoasri yang mencerminkan masyarakat pedesaan pada umumnya menjadikan lokasi ini representatif untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui program PKK.

Kemudahan akses data turut menjadi pertimbangan pemilihan lokasi. Pihak desa memberikan kesempatan kepada peneliti untuk berkoordinasi secara administratif dan teknis selama pelaksanaan penelitian, sehingga proses pengumpulan data dapat berlangsung tertib dan sesuai prosedur akademik. Keterbukaan tersebut turut meminimalkan hambatan teknis di lapangan dan mendukung efisiensi pelaksanaan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci yang terdiri atas kepala desa, ketua Tim Penggerak PKK, ketua kelompok kerja, dan masyarakat penerima manfaat, guna menggali informasi tentang pelaksanaan program PKK dan pemberdayaan masyarakat. Observasi dilakukan terhadap interaksi pengurus PKK dengan masyarakat penerima manfaat, sedangkan dokumentasi meliputi arsip program, laporan kegiatan, dan struktur organisasi PKK. Rincian informan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Waktu
1	Kepala Desa/Perangkat Desa	1 orang	30 menit
2	Ketua TP PKK Desa	1 orang	30 menit
3	Ketua Pokja	2 orang	30 menit
4	Masyarakat Penerima Manfaat	1 orang	30 menit

Teknik Analisis Data dan Triangulasi

Data dianalisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui transkrip verbatim hasil wawancara, penandaan pernyataan penting, dan pengategorian data ke dalam tema bentuk program, proses pemberdayaan, dampak, serta faktor pendukung dan penghambat. Data wawancara disajikan dalam kutipan langsung, data observasi disajikan dalam catatan naratif lapangan, dan data dokumen disajikan dalam bentuk ringkasan sebelum kesimpulan ditarik.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala desa, ketua TP PKK, ketua pokja, dan masyarakat penerima manfaat, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menguji konsistensi data melalui wawancara, observasi terbatas, dan studi dokumentasi pada sumber yang sama. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi ulang hasil wawancara kepada informan melalui pesan singkat atau panggilan telepon setelah proses transkrip selesai, sehingga kesalahan penafsiran dapat diminimalkan.

Proses analisis dan triangulasi tersebut dilakukan secara berulang selama pengolahan data berlangsung, bukan hanya pada tahap akhir penelitian. Peneliti kembali memeriksa catatan lapangan dan transkrip wawancara setiap kali ditemukan data baru yang berpotensi mengubah atau memperkuat kategori tema yang sudah disusun sebelumnya. Cara kerja demikian membantu menjaga konsistensi antara data mentah dan interpretasi yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan.

RESULTS & DISCUSSION

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Purwoasri pada mulanya merupakan kawasan hutan yang berdekatan dengan Sungai Brantas, sehingga tumbuhan di sekitarnya tumbuh subur dan terlihat asri. Seiring waktu, warga yang mencari permukiman strategis dan dialiri sungai mulai menetap di wilayah antara jalur sungai dan jalan Kediri-Kertosono tersebut.

Salah seorang sesepuh kemudian memprakarsai pembentukan kesatuan desa baru di wilayah itu dan memberinya nama Purwoasri, gabungan dari kata purwo yang berarti hutan dan asri yang berarti indah dan sejuk.

Desa Purwoasri terletak di Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 175.440 Ha. Desa ini berbatasan dengan Desa Purwodadi di sebelah utara, Desa Pesing di sebelah selatan, Desa Pandansari di sebelah timur, serta Sungai Brantas di sebelah barat. Jumlah penduduk Desa Purwoasri tercatat 3.850 jiwa yang tersebar di Dusun Templek, Dusun Mliler, dan Dusun Pandan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Kependudukan Desa Purwoasri

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.851 orang
2	Perempuan	1.999 orang
	Jumlah Penduduk	3.850 orang
	Jumlah Kepala Keluarga	1.331 KK

Masyarakat Desa Purwoasri mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, tebu, dan hortikultura, di samping usaha peternakan sapi, kambing, dan ayam. Pemerintah desa secara rutin membangun saluran irigasi setiap tahun untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama pada musim kemarau. Kehidupan sosial masyarakat tergolong harmonis dengan solidaritas yang tinggi, tercermin dari pelaksanaan gotong royong dan kegiatan keagamaan secara rutin.

Kelembagaan PKK Desa Purwoasri

Struktur kelembagaan PKK Desa Purwoasri terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan empat Kelompok Kerja (Pokja) yang masing-masing bertanggung jawab pada bidang tertentu, sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Pokja I mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong, Pokja II mengelola pendidikan dan keterampilan, Pokja III mengelola pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga, dan Pokja IV mengelola kesehatan serta kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3. Struktur Kepengurusan PKK Desa Purwoasri

No	Nama	Jabatan
1	Prasetyani	Ketua PKK
2	Ismu Mahbulah	Wakil Ketua
3	Sri Wahyuni	Sekretaris
4	Betty Nilasari	Bendahara
5	Susiani	Ketua Pokja I
6	Meranti Wulandari	Ketua Pokja II
7	Ziadatul Mubarakah	Ketua Pokja III
8	Sripina Ulandari	Ketua Pokja IV

PKK Desa Purwoasri juga menjalankan pembinaan administrasi secara berkala, terlihat dari kunjungan Tim Pembina Administrasi PKK Kabupaten yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program dan memberi arahan penyempurnaan program pada tahun berikutnya (PKK Desa Purwoasri, 2021). Kegiatan ini

menunjukkan komitmen PKK Desa Purwoasri untuk terus meningkatkan kualitas program dan tertib administrasi. Program yang dijalankan secara rutin oleh keempat Pokja tersebut disajikan secara ringkas pada Tabel 4.

Tabel 4. Program Rutin PKK Desa Purwoasri

No	Pokja	Program Rutin	Sasaran
1	Pokja I	Pengajian rutin, peringatan hari besar nasional, gotong royong	Seluruh warga
2	Pokja II	Pelatihan keripik singkong dan pisang, menjahit	Kader dan ibu dasawisma
3	Pokja III	Pemanfaatan pekarangan, sosialisasi B2SA, pembinaan rumah sehat	Keluarga sasaran
4	Pokja IV	Posyandu, kebersihan lingkungan, penghijauan	Ibu dan balita

Bentuk Program PKK yang Mengandung Nilai Pendidikan Kewarganegaraan

Program penghayatan dan pengamalan Pancasila pada Pokja I diwujudkan melalui pengajian rutin, peringatan hari besar nasional, serta sosialisasi nilai kebangsaan dan gotong royong. Salah satu informan menyatakan bahwa kegiatan pengajian dan gotong royong sudah menjadi rutinitas yang di dalamnya sering disampaikan pentingnya kerukunan dan kebersamaan sebagai nilai Pancasila. Kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan membantu warga yang mengalami musibah sejalan dengan civic disposition, sedangkan keterlibatan warga dalam kegiatan kolektif tersebut melatih civic skill masyarakat.

Program pendidikan dan keterampilan pada Pokja II mencakup pelatihan membuat keripik singkong dan pisang, menjahit, dan keterampilan lain yang meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga. Di balik pelatihan teknis tersebut, terkandung muatan kewarganegaraan yang lebih luas, seperti kemandirian ekonomi, etos kerja, dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Program ini menunjukkan bahwa PKK Desa Purwoasri tidak berhenti pada pemberian keterampilan teknis, tetapi juga membangun kemandirian dan kapasitas masyarakat mengelola sumber daya lokal.

Program pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga pada Pokja III berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, mencakup pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan, sosialisasi pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta pembinaan rumah sehat. Pokja III senantiasa berkolaborasi dengan dinas terkait agar program berjalan terarah dan terukur. Nilai solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, dan partisipasi aktif tercermin dalam pelaksanaan program ini.

Program kesehatan dan lingkungan pada Pokja IV mencakup Posyandu bulanan serta kegiatan kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan penghijauan. Posyandu berfungsi sebagai layanan kesehatan sekaligus sarana edukasi gizi, kebersihan, dan pola hidup sehat, yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban menjaga kesehatan. Program lingkungan menunjukkan adanya pembangunan kesadaran ekologis dan tanggung jawab warga negara terhadap kelestarian lingkungan.

Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PKK

Proses pemberdayaan di Desa Purwoasri berlangsung melalui tahap penyadaran, transformasi, dan peningkatan kemampuan. Tahap penyadaran dilakukan melalui sosialisasi program, pengajian rutin, dan pertemuan warga yang menyampaikan pentingnya peran keluarga dalam pembangunan serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu kader menyatakan bahwa pengajian rutin menjadi ajang silaturahmi sekaligus belajar bersama tentang kesehatan, pendidikan, dan hidup rukun bertetangga.

Tahap transformasi diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan seperti pembuatan keripik singkong dan pisang serta menjahit, yang membekali masyarakat, terutama perempuan, dengan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pembinaan administrasi oleh Tim PKK Kabupaten turut memperkuat kapasitas kelembagaan kader dalam mengelola program (PKK Desa Purwoasri, 2021). Tahap peningkatan kemampuan tampak dari keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan usaha kecil serta partisipasi dalam musyawarah dan gotong royong pembangunan desa.

Dampak Program PKK terhadap Partisipasi Masyarakat

Program PKK di Desa Purwoasri memberi dampak positif terhadap partisipasi masyarakat, terutama kaum perempuan, dalam berbagai aspek pembangunan desa. Dampak tersebut terlihat dari peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial, peningkatan kesejahteraan keluarga melalui akses layanan kesehatan dan keterampilan produktif, serta peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Program PKK dengan demikian tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pengembangan kapasitas dan kesadaran kewarganegaraan masyarakat.

Peningkatan partisipasi perempuan juga tampak dari keterlibatan mereka dalam musyawarah desa, yang sebelumnya jarang diikuti secara aktif oleh kaum perempuan. Kepala Desa Purwoasri mengajak warga bermusyawarah dalam perencanaan pembangunan irigasi, dan keterlibatan perempuan dalam forum tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang turut menentukan arah pembangunan desa. Perubahan pola partisipasi semacam ini menjadi indikator penting bahwa program PKK berkontribusi terhadap penguatan demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi program PKK meliputi dukungan pemerintah desa, partisipasi aktif kader dan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan pemerintah desa menjadi faktor yang signifikan karena keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan anggaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan administrasi dan dokumentasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman kader tentang dimensi pendidikan kewarganegaraan dalam program yang dijalankan.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal turut memperkuat pelaksanaan program, misalnya kerja sama Pokja III dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Kerja sama lintas sektor semacam ini memastikan program berjalan terarah dan mendapat dukungan teknis yang memadai dari luar struktur PKK. Keterlibatan kader dasawisma yang aktif

menjalankan tugas hingga tingkat rukun warga juga menjadi penopang penting keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Pembahasan

Program PKK sebagai Sarana Pendidikan Kewarganegaraan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program PKK di Desa Purwoasri mengandung tiga dimensi pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan Branson dan Winarno, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Civic knowledge tercermin dalam pemahaman masyarakat tentang nilai Pancasila, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang ditanamkan melalui pengajian dan sosialisasi. Civic skill tercermin dalam kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan musyawarah desa, sedangkan civic disposition tercermin dalam sikap gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa PKK secara tidak langsung telah menjalankan fungsi pendidikan kewarganegaraan di tingkat akar rumput, sejalan dengan pandangan bahwa program kemasyarakatan mampu membentuk warga negara yang aktif dan partisipatif (Febrianti et al., 2023; Winarno, 2013). Kesadaran kader dan masyarakat tentang dimensi kewarganegaraan dalam kegiatan sehari-hari itu, meskipun demikian, masih perlu ditingkatkan agar potensi PKK sebagai lembaga pendidikan kewarganegaraan dapat dioptimalkan.

Temuan ini juga memperkuat pandangan Hastangka (2018) bahwa organisasi perempuan di tingkat akar rumput dapat menjadi wahana civic engagement, sekalipun konteks dan bentuk kegiatannya berbeda dari Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang diteliti sebelumnya. Perbedaan konteks ini justru memperlihatkan bahwa nilai kewarganegaraan dapat tumbuh melalui berbagai jalur kelembagaan, baik melalui program pemerintah seperti PKK maupun inisiatif lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menambah bukti empiris bahwa domain sosial-kultural pendidikan kewarganegaraan tidak tunggal bentuknya, melainkan tersebar pada berbagai ruang kemasyarakatan yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik.

Ketiga dimensi civic knowledge, civic skill, dan civic disposition pada program PKK Desa Purwoasri tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang dalam praktik sehari-hari kader dan masyarakat. Pengetahuan tentang nilai Pancasila yang diperoleh melalui pengajian, misalnya, baru bermakna ketika dipraktikkan lewat keterampilan bekerja sama dalam gotong royong, dan pada akhirnya membentuk sikap kepedulian terhadap kepentingan bersama. Pola keterkaitan semacam ini menegaskan bahwa program pemberdayaan berbasis komunitas dapat menjadi laboratorium pendidikan kewarganegaraan yang lebih hidup dibandingkan pembelajaran di ruang kelas semata, karena warga langsung mengalami dan mempraktikkan nilai yang dipelajari.

Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PKK

Proses pemberdayaan masyarakat melalui program PKK di Desa Purwoasri sejalan dengan tiga tahap pemberdayaan yang dikemukakan Sumodiningrat, yaitu penyadaran, transformasi, dan peningkatan kemampuan (dalam Nahak, Syukur, & Selly, 2024). Temuan ini mengonfirmasi bahwa pemberdayaan berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, bukan bersifat instan, meskipun intensitas pelaksanaannya bervariasi antarprogram. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten

dan berbagai pemangku kepentingan turut mendukung keberhasilan proses tersebut (Nahak, Syukur, & Selly, 2024; Laba, 2024).

Kontribusi Program PKK terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Program PKK memberi kontribusi positif terhadap partisipasi masyarakat, terutama perempuan, melalui peningkatan keterlibatan dalam kegiatan sosial, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kesadaran akan hak serta kewajiban warga negara. Kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga tampak dari program Posyandu yang meningkatkan akses layanan kesehatan serta program keterampilan yang mendukung usaha produktif, sejalan dengan tujuan 10 Program Pokok PKK untuk memberdayakan keluarga menuju kesejahteraan lahir dan batin (Devfa & Mardhiah, 2022; Tussoleha Rony et al., 2023).

Temuan tentang kontribusi PKK terhadap partisipasi perempuan ini sejalan dengan penelitian pada program PKK Desa Petogogan yang menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan dan penguatan ekonomi keluarga mampu mendorong keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kegiatan sosial dan ekonomi desa (Pemerintah Desa Petogogan, 2026). Kesamaan pola tersebut memperkuat argumen bahwa PKK, di berbagai konteks desa yang berbeda, secara konsisten berfungsi sebagai wahana penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Perbedaan yang tampak terletak pada penekanan dimensi kewarganegaraan, yang pada penelitian ini dikaji secara lebih eksplisit melalui kerangka civic knowledge, civic skill, dan civic disposition.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program PKK

Dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah desa, partisipasi aktif kader, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah kabupaten dan institusi pendidikan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program (PRISMA Mengabdi UB, 2025; Radar Kediri, 2025). Faktor penghambat berupa keterbatasan administrasi, keterbatasan sumber daya, dan minimnya pemahaman kader tentang dimensi kewarganegaraan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan tetap menjadi prioritas dalam optimalisasi peran PKK (PKK Desa Purwoasri, 2021; Lubis, 2023).

Faktor penghambat tersebut sejalan dengan temuan penelitian tentang kolaborasi pemerintah dan kelompok informal di Lemahputro, yang menunjukkan bahwa tata kelola hibrida dapat mengurangi jarak birokrasi sekaligus melegitimasi peran organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan hak warga (Prakasita, Hamdani, & Adzronnida, 2025). Kolaborasi semacam ini relevan diterapkan di Desa Purwoasri untuk mengurangi hambatan administratif yang selama ini menghambat evaluasi program. Penguatan dokumentasi dan pencatatan kegiatan PKK, dengan demikian, tidak hanya bermanfaat bagi akuntabilitas program, tetapi juga bagi keberlanjutan pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan melalui aktivitas sehari-hari kader dan masyarakat.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program PKK di Desa Purwoasri, khususnya pada Pokja I hingga Pokja IV, mengandung bentuk nilai pendidikan kewarganegaraan yang tercermin dalam civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Proses pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui tahap

penyadaran, transformasi, dan peningkatan kemampuan, yang menunjukkan keterkaitan erat antara pemberdayaan dan penanaman nilai kewarganegaraan. Dampak program PKK terhadap partisipasi masyarakat terlihat pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Faktor pendukung berupa dukungan pemerintah desa dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, sedangkan faktor penghambat berupa keterbatasan administrasi dan pemahaman kader, menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan PKK perlu terus diupayakan agar perannya sebagai agen pendidikan kewarganegaraan di tingkat desa dapat dioptimalkan.

REFERENCES

- Benu, A. dkk. (2026). Civic knowledge, civic skill, dan civic disposition dalam pendidikan kewarganegaraan. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Devfa, S., & Mardhiah, N. (2022). Pendidikan politik dalam program PKK di tingkat desa. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Dina, R. dkk. (2023). Ketidakberdayaan dan ketimpangan dalam pemberdayaan masyarakat. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Faruq Fahmi Rubeka. (2026). Pengawasan partisipatif dan pendidikan politik keluarga oleh Bawaslu Jepara. [Sumber pemberitaan, rincian tautan belum tersedia pada naskah asli].
- Febrianti, D. dkk. (2023). Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan warga negara aktif. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Hastangka. (2018). Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK sebagai gerakan sosiokultural kewarganegaraan. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Herawati, T. dkk. (2010). Dimensi tujuan pemberdayaan masyarakat. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- InfoPublik. (2025). Kader PKK Lumajang didorong jadi agen perubahan di tingkat desa. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Lubis, A. (2023). Keterbatasan pemahaman kader terhadap dimensi kewarganegaraan dalam program pemberdayaan. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Muktiono. (2024). Sepuluh Program Pokok PKK dan pengelompokan kelompok kerja. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Nahak, H. M., Syukur, M., & Selly, E. (2024). Tahapan pemberdayaan masyarakat model Sumodiningrat. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Pemerintah Desa Cempaka Putih Barat. (2025). PKK dan peranannya dalam mewujudkan Desa Cempaka Putih Barat yang mandiri.
- Pemerintah Desa Petogogan. (2026). Mendorong partisipasi aktif melalui program PKK di Desa Petogogan.
- PKK Desa Purwoasri. (2021). Laporan kegiatan dan pembinaan administrasi PKK Desa Purwoasri.

- Prakasita, A. W., Hamdani, D., & Adzronnida, T. N. (2025). Collaboration for citizenship rights: Government and informal group in Lemahputro Riverbank. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- PRISMA Mengabdi UB. (2025). Kolaborasi institusi pendidikan dalam penguatan program pemberdayaan desa.
- Radar Kediri. (2025). Pemerintah Desa Purwoasri dorong pembangunan irigasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Raja, R. (2025). Strategi komunikasi humanis, partisipatif, dan kontekstual dalam program PKK. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Sari, D. dkk. (2024). Partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dan pendidikan politik berbasis organisasi kemasyarakatan. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Septiani, W. (2018). Peran perempuan dalam pemerintahan desa dan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Sri Devfa & Nellis Mardhiah. (2022). Pendidikan politik tidak terencana dalam kegiatan PKK di Desa Laut Dendang. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Stiawati, T., & Indriyany, I. (2022). Tujuan PKK dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Tussoleha Rony, Z. dkk. (2023). Fungsi perencanaan, pelaksana, pengendali, dan penggerak Tim Penggerak PKK. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Winarno. (2013). Pendidikan kewarganegaraan dalam ranah formal, informal, dan nonformal. [Rincian jurnal dan DOI belum tersedia pada naskah asli].
- Zubaedi. (2013). Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife. [Rincian penerbit belum tersedia pada naskah asli].